

Implementasi Program Padat Karya dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya Tahun 2024

Prana Lintang Gading Mayang Pandita, Kharisma Eka Deviyanti, Bagus Surya Batara, Fadhlana Firdaus Syafrudin, Ananta Prathama

Prodi Administrasi Publik, FISIP

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

fadhlana.firdaus.syafrudin@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the implementation and impact of the Labor Intensive program in reducing poverty in Semampir Sub-district. This research uses qualitative research with a descriptive approach to describe something and be able to explain it in detail, so it is hoped that qualitative research can answer the formulation of the problem. The results of the research obtained, that the Implementation of the Labor Intensive Program in Semampir District in 2024 the results are not fully maximized, this can be seen from the four aspects initiated by George Edward III, namely from the aspect of communication is good, the use of resources is maximum, the disposition aspect is maximum, but there are still shortcomings in the aspect of bureaucratic structure. The impact of the labor-intensive program in Semampir Sub-district is that this program has not succeeded in reducing poverty because the achievement percentage is still 14.69% of 100% with a dependency ratio condition of 46.83 in 2023.

Keywords: Implementation; Labor Intensive Program; Reducing the MBR Number

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan dampak program Padat Karya dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Semampir. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk melakukan deskripsi sesuatu serta dapat menjelaskannya secara detail, sehingga diharapkan penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa Implementasi Program Padat Karya di Kecamatan Semampir tahun 2024 hasilnya belum sepenuhnya maksimal, hal ini dapat ditinjau dari empat aspek yang digagas oleh George Edward III yakni dari aspek komunikasi sudah baik, penggunaan sumber daya sudah maksimal, aspek disposisi sudah maksimal, namun masih terdapat kekurangan dalam aspek struktur birokrasi. Adapun dampak dari adanya program padat karya di Kecamatan Semampir adalah program ini belum berhasil menanggulangi kemiskinan karena presentase capaian masih 14,69% dari 100% dengan kondisi rasio ketergantungan sebesar 46,83 pada tahun 2023.

Kata kunci: Implementasi; Program Padat Karya; Kemiskinan

PENDAHULUAN

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami isu kemiskinan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada Maret 2023 sebesar 4,18 juta jiwa. Penduduk miskin tersebut

mencapai 10,35% dari total populasi provinsinya (Jatim, 2023). Kemiskinan adalah masyarakat berkehidupan dengan kondisi kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan yang dimaksud adalah hal pokok seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi (Damanik & Sidauruk, 2020). Sedangkan, kemiskinan dapat terjadi karena dua kondisi yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan karena kondisi alamiah terjadi dampak dari sumber daya alam yang terbatas, rendahnya penggunaan teknologi dan bencana alam. Kemiskinan buatan diakibatkan dengan kondisi masyarakat yang tidak produktif dalam kehidupan sehari-hari sehingga sulit untuk keluar dari kemiskinan (Sholihin, 2021).

Nabibah & Hanifa (2022) menyebutkan bahwa kemiskinan di Jawa Timur dipengaruhi peningkatan dari jumlah penduduk, pengangguran, dan pendidikan. Pemerintah Jawa Timur membuat kesepakatan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024 menurut strategi empat arah pembangunan yang terdiri dari *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment* dimana kebijakan tersebut berfokus salah satunya untuk mengurangi kemiskinan (Fatikhurriqi & Kurniawan, 2022). Pengurangan angka kemiskinan akan tercapai apabila lapangan pekerjaan dapat menyerap tenaga kerja yang ada, terutama pada sektor-sektor padat karya dan menyebar pada setiap golongan pendapatan, termasuk digolongan penduduk miskin (Ramdani & Ratnawati, 2023).

Kota Surabaya adalah salah satu kota terbesar di Jawa Timur yang saat ini dijadikan sebagai pilihan tempat untuk bekerja. Jika dilihat dari pertumbuhan IPM, Kota Surabaya mengalami kenaikan secara konsisten terhitung sejak tahun 2021-2023 dengan rata-rata pertumbuhan 0,49% per tahun. Pada tahun 2023 angka IPM Surabaya mencapai 83,99 dengan angka pertumbuhan penduduk yang stabil dan kenaikan angka IPM yang konsisten seharusnya Kota Surabaya dapat menangani permasalahan kemiskinan, namun muncul permasalahan baru yaitu tingginya tingkat rasio ketergantungan di Kota Surabaya (Pemkot, 2024).

Hartomo dan Aziz (1997) mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah tingginya angka rasio ketergantungan, seseorang yang memiliki jumlah anggota yang banyak dan memiliki peningkatan pendapatan yang tidak seimbang akan menyebabkan kemiskinan karena semakin banyak jumlah anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, rasio ketergantungan adalah beban tanggungan yang harus ditanggung oleh usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk tidak produktif (< 15 dan 65 tahun keatas). Semakin tinggi presentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin beratnya beban yang ditanggung oleh usia produktif untuk membiayai kebutuhan hidup (Disdukcapil, 2023). Untuk menghitung rasio ketergantungan pada suatu daerah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RK_{muda} = \frac{P_{0-14}}{P_{15-64}}$$

$$RK_{tua} = \frac{P_{65+}}{P_{15-64}}$$

$$RK_{total} = \frac{P_{0-14} + P_{65+}}{P_{15-64}}$$

dimana :
 RK_{total} = Rasio ketergantungan penduduk usia muda dan tua
 RK_{muda} = Rasio ketergantungan penduduk usia muda
 RK_{tua} = Rasio ketergantungan penduduk usia tua
 P_{0-14} = Jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun)
 P_{65+} = Jumlah penduduk usia tua (65 tahun keatas)
 P_{15-64} = Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun)

Kecamatan District	0-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		Kecamatan District	15-19 Tahun		20-24 Tahun		25-29 Tahun		30-34 Tahun		35-39 Tahun		40-44 Tahun		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female		Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
Karanganyang	2.513	2.372	2.961	2.833	3.103	2.816	Karanganyang	2.885	2.899	3.007	2.888	2.822	2.900	Karanganyang	2.891	2.919	2.872	2.924	3.045	3.155
Jambangan	1.881	1.770	2.027	2.029	2.095	2.210	Jambangan	2.238	2.092	1.989	1.987	1.912	2.047	Jambangan	1.994	1.900	1.920	2.007	2.061	2.364
Gayungan	1.374	1.208	1.723	1.560	1.789	1.720	Gayungan	1.790	1.726	1.709	1.719	1.535	1.615	Gayungan	1.453	1.609	1.476	1.537	1.789	1.986
Wonorejo	2.664	2.411	3.081	2.825	3.037	2.898	Wonorejo	3.155	3.047	3.196	3.047	3.047	2.885	Wonorejo	2.770	2.823	2.841	2.948	2.881	3.255
Tenggiling Moyyo	1.800	1.797	2.201	2.203	2.436	2.278	Tenggiling Moyyo	2.385	2.178	2.192	2.112	1.970	2.128	Tenggiling Moyyo	2.099	2.111	2.200	2.145	2.654	2.797
Gemung Anyar	2.105	1.994	2.134	2.341	2.480	2.467	Gemung Anyar	2.411	2.193	2.288	2.282	2.208	2.360	Gemung Anyar	2.270	2.199	2.330	2.614	2.705	2.772
Rangket	4.080	3.851	4.827	4.451	5.139	4.780	Rangket	4.468	4.414	4.225	4.493	4.095	4.540	Rangket	4.518	4.638	4.668	4.845	4.975	5.136
Sakalilo	3.718	3.822	4.723	4.209	4.785	4.537	Sakalilo	4.413	4.317	4.403	4.290	4.147	4.252	Sakalilo	4.226	4.276	4.400	4.638	4.877	4.986
Mulyorejo	2.723	2.925	3.306	3.092	3.407	3.262	Mulyorejo	3.611	3.756	3.677	3.313	3.149	3.270	Mulyorejo	3.126	3.293	3.405	3.562	3.562	3.792
Gubeng	3.977	3.742	4.841	4.461	5.234	4.891	Gubeng	5.295	4.963	5.178	5.104	4.892	4.971	Gubeng	4.314	4.483	4.450	4.548	5.090	5.384
Wondokromo	4.771	4.320	5.664	5.353	6.227	5.844	Wondokromo	6.124	5.954	6.477	6.190	5.893	5.874	Wondokromo	5.088	5.207	5.181	5.142	5.880	6.315
Dukuh Paksi	5.919	5.672	6.314	5.800	6.462	6.232	Dukuh Paksi	7.263	7.146	7.170	7.078	6.956	7.029	Dukuh Paksi	6.020	6.194	6.230	6.277	6.675	6.947
Wiyung	2.864	2.284	2.814	2.725	3.123	2.827	Wiyung	2.983	2.830	3.101	2.905	2.942	2.947	Wiyung	2.828	2.915	2.739	2.818	3.084	3.229
Tandes	2.199	2.077	2.120	2.456	2.785	2.508	Tandes	2.263	2.346	2.395	2.563	2.433	2.512	Lakarsantri	2.423	2.322	2.409	2.623	2.780	2.980
Sambikemp	2.132	2.220	2.638	2.577	2.892	2.705	Sambikemp	2.740	2.672	2.635	2.546	2.649	2.636	Sambikemp	2.521	2.602	2.451	2.662	2.910	3.011
Lakarsantri	2.942	2.802	3.055	3.558	4.029	3.813	Lakarsantri	3.745	3.699	3.855	3.742	3.770	3.790	Lakarsantri	3.423	3.403	3.403	3.507	4.160	4.178
Sukomanunggal	3.502	3.187	4.182	3.914	4.143	4.163	Sukomanunggal	4.049	3.902	4.038	3.909	3.779	3.770	Sukomanunggal	3.677	3.677	3.677	4.229	4.754	4.641
Sawahan	6.277	5.885	7.412	7.127	8.466	7.958	Sawahan	8.002	7.522	8.098	7.777	7.286	7.005	Sawahan	6.071	6.703	6.944	7.012	8.195	8.478
Nglayan	2.971	2.856	3.754	3.590	4.051	3.863	Nglayan	3.813	3.565	3.813	3.713	3.689	3.891	Nglayan	3.408	3.369	3.548	3.548	3.942	4.021
Getings	1.710	1.648	2.107	2.070	2.402	2.303	Getings	2.330	2.280	2.317	2.385	2.170	2.058	Getings	2.007	1.932	2.096	2.095	2.439	2.387
Tambakani	7.154	6.828	8.771	8.121	9.575	8.826	Tambakani	8.864	8.443	9.112	8.623	8.421	8.730	Tambakani	7.962	7.901	8.593	8.650	9.274	9.440
Kenjeran	7.418	6.909	8.176	7.756	8.340	7.813	Kenjeran	7.643	7.087	7.577	7.472	7.476	7.658	Kenjeran	6.821	7.024	6.821	7.247	7.517	7.156
Bulak	1.703	1.628	1.900	1.861	2.096	2.015	Bulak	2.033	1.928	2.016	1.927	1.800	1.823	Bulak	1.763	1.720	1.740	1.808	1.901	1.935
Semampir	7.110	6.828	8.316	7.817	8.451	7.994	Semampir	7.768	7.273	7.809	7.399	7.241	7.038	Semampir	6.970	6.666	6.875	6.626	7.060	6.997
Pabean Cantian	2.641	2.428	3.018	2.852	3.124	2.995	Pabean Cantian	3.066	2.824	3.089	2.923	2.763	2.763	Pabean Cantian	2.626	2.615	2.779	2.996	2.963	3.027
Bubutan	3.229	3.050	3.772	3.618	4.128	3.755	Bubutan	4.009	3.725	4.068	3.891	3.666	3.622	Bubutan	3.333	3.283	3.382	3.327	3.745	3.900
Kembangsan	4.139	3.826	4.772	4.290	4.898	4.686	Kembangsan	4.931	4.481	4.823	4.500	4.444	4.194	Kembangsan	4.189	4.189	4.136	4.058	4.335	4.505
Asemoro	1.988	1.909	2.182	2.074	2.170	1.970	Asemoro	2.060	2.007	2.005	2.005	1.988	1.912	Asemoro	1.888	1.911	1.999	1.999	1.923	1.923
Bonowo	2.011	2.422	3.090	2.849	3.250	3.074	Bonowo	3.140	3.015	2.961	3.009	2.950	2.951	Bonowo	2.568	2.656	2.705	2.737	2.977	3.289
Pakel	2.198	2.157	2.571	2.456	2.795	2.640	Pakel	2.267	2.499	2.615	2.536	2.488	2.488	Pakel	2.321	2.302	2.391	2.360	2.429	2.485
Kota Surabaya	101.413	95.519	119.889	113.689	127.855	120.811	Kota Surabaya	121.299	114.066	121.654	118.548	113.334	112.398	Kota Surabaya	107.665	108.138	111.822	112.920	122.924	126.224
Kecamatan District	45-49 Tahun		50-54 Tahun		55-59 Tahun		Kecamatan District	60-64 Tahun		65-69 Tahun		70-74 Tahun		Kecamatan District	>=75 Tahun		Jumlah Total			
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female		Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki Male	Perempuan Female							
Karanganyang	2.653	2.669	2.458	2.732	2.023	2.363	Karanganyang	1.669	1.999	1.276	1.376	680	707	Karanganyang	521	619	75.572			
Jambangan	1.563	2.883	1.779	1.897	1.396	1.573	Jambangan	1.074	1.317	851	922	403	514	Jambangan	397	488	54.206			
Gayungan	1.668	1.427	1.525	1.684	1.229	1.350	Gayungan	888	1.080	842	777	442	549	Gayungan	413	617	43.999			
Wonorejo	3.011	3.304	2.750	2.803	2.039	2.237	Wonorejo	1.533	1.946	1.266	1.511	796	952	Wonorejo	728	727	79.886			
Tenggiling Moyyo	2.270	2.273	1.939	2.047	1.430	1.617	Tenggiling Moyyo	1.168	1.502	1.067	1.100	564	662	Tenggiling Moyyo	493	736	58.999			
Gemung Anyar	2.376	2.553	2.282	2.150	1.563	1.821	Gemung Anyar	1.241	1.388	982	998	538	598	Gemung Anyar	393	601	61.565			
Rangket	4.403	4.918	4.678	4.253	3.130	3.564	Rangket	2.527	3.055	1.866	1.994	1.301	1.238	Rangket	815	1.283	151.943			
Sakalilo	4.230	4.393	3.582	3.842	2.827	3.255	Sakalilo	2.384	2.817	1.858	2.125	1.175	1.331	Sakalilo	1.025	1.126	115.899			
Mulyorejo	3.181	3.381	2.879	3.006	2.231	2.525	Mulyorejo	1.294	2.155	1.468	1.753	1.016	1.217	Mulyorejo	516	612	67.526			
Gubeng	4.955	5.224	4.822	5.243	4.068	4.613	Gubeng	3.086	3.805	2.208	2.540	1.340	1.963	Gubeng	1.582	1.779	193.804			
Wondokromo	5.768	6.273	5.855	6.314	4.658	5.074	Wondokromo	3.556	3.839	2.159	2.504	1.288	1.873	Wondokromo	1.430	2.146	164.995			
Dukuh Paksi	3.181	3.254	3.059	3.043	2.512	2.627	Dukuh Paksi	1.366	1.490	979	1.240	607	792	Dukuh Paksi	407	573	80.787			
Wiyung	2.725	2.821	2.553	2.732	2.140	2.307	Wiyung	1.661	1.912	1.227	1.367	628	658	Wiyung	477	764	75.382			
Lakarsantri	2.208	2.334	2.176	2.148	1.608	1.778	Lakarsantri	1.299	1.318	874	864	470	576	Lakarsantri	425	612	64.862			
Tandes	2.532	2.620	2.209	2.129	1.744	1.840	Tandes	1.318	1.413	985	1.118	591	626	Tandes	366	603	67.943			
Sukomanunggal	3.590	3.718	3.832	3.127	2.238	2.387	Sukomanunggal	1.614	2.082	1.305	1.919	987	1.153	Sukomanunggal	823	1.039	112.922			
Sawahan	1.917	4.616	3.182	3.363	2.419	2.865	Sawahan	2.655	3.149	1.711	2.069	1.123	1.289	Sawahan	689	1.161	164.943			
Nglayan	7.682	7.784	7.095	7.541	5.511	6.083	Nglayan	4.095	4.483	2.914	3.886	1.856	2.487	Nglayan	1.855	2.392	199.336			
Getings	1.538	1.627	1.707	1.808	1.224	1.377	Getings	2.214	2.687	1.809	2.016	981	1.276	Getings	695	1.166	86.217			
Tambakani	8.063	8.517	7.484	7.967	6.214	6.915	Tambakani	4.947	5.942	3.714	4.382	2.222	2.799	Tambakani	1.826	3.100	220.995			
Kenjeran	6.194	6.362	6.419	5.521	4.240	4.480	Kenjeran	3.82												

produktif di Kecamatan Semampir sangatlah tinggi untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif (Disdukcapil, 2024).

Pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, salah satunya dengan membuat Program Padat Karya (RPJMD, 2021). Program ini mulai dirancang pada dokumen RPJMD Kota Surabaya 2021- 2026 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2021. Padat karya adalah program pembangunan yang memfokuskan pada penggunaan sumber daya manusia untuk melakukan sebuah pekerjaan terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah (RPJMD, 2021). Bentuk program padat karya yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah berupa pemberian pekerjaan seperti pembuatan paving, cuci mobil, pelatihan dan pemberian modal UMKM, servis ac, perbaikan balai RW, dan pelatihan menjahit (Walikota, 2020).

Ketentuan target dalam program padat karya adalah warga yang telah memiliki KTP Kota Surabaya yang berusia 18-60 tahun terutama warga yang belum memiliki penghasilan tetap dan warga yang kurang mampu. Keluarga miskin yang memperoleh izin untuk mengikuti program padat karya wajib membuat kelompok usaha meliputi pendaftaran perizinan, pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), terdaftar sebagai pengguna Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi keluarga miskin, serta memanfaatkan barang milik daerah sesuai aturan yang berlaku (Walikota, 2020). Tujuan dari adanya program padat karya ini adalah memberikan kesempatan kepada warga Surabaya yang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing di dunia kerja, sehingga diharapkan dengan adanya padat karya, kemungkinan warga untuk menganggur akan berkurang. Modal pelaksanaan program padat karya berasal dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah, sebagaimana diatur di Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2023 Pasal 18, dana yang dialokasikan untuk program padat karya berasal dari APBD daerah Kota Surabaya (Walikota, 2020).

Lafina, A. R., Sholichah, N., Wardhono, H., & Widyawati pada tahun 2023 dengan judul “Implementasi Program Padat Karya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Dalam Perspektif *Collaborative Governance* di Kelurahan Manyar Sabrangan Kota Surabaya”. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah memiliki fokus penelitian yang sama yakni terkait implementasi program padat karya. Namun, terdapat perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan penulis yaitu perspektif penelitian penulis hanya dari implementasi program, sedangkan penelitian tersebut menggunakan perspektif *Collaborative governance*.

Novanto, H. E., & Wibawani, S pada tahun 2023 dengan judul “Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa”. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan perbedaannya adalah penelitian ini memiliki fokus pada implementasi program padat karya dalam menanggulangi kemiskinan, sedangkan penelitian tersebut tentang implementasi program padat karya tunai desa.

Saat ini pemerintah sudah melakukan upaya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan melalui Program Padat Karya. Namun, data yang diperoleh dari Disdukcapil Kota Surabaya Tahun 2023 menunjukkan bahwa Kecamatan Semampir menjadi kecamatan dengan tingkat rasio ketergantungan tertinggi di Kota Surabaya. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Program Padat Karya dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya”? dengan tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi dan dampak program padat karya dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk melakukan deskripsi sesuatu serta dapat menjelaskannya secara detail, sehingga diharapkan penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Jl. Iskandar Muda No. 16 Kota Surabaya. Dengan fokus penelitian yaitu implementasi program padat karya dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Berdasarkan teori model implementasi kebijakan menurut George Edward III menyebutkan empat syarat utama keberhasilan proses implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi.

Pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui artikel jurnal, dokumen RPJMD, dan data rasio ketergantungan Kecamatan Semampir. Informan penelitian ini adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Kecamatan Semampir dan 1 masyarakat pelaksana program padat karya. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif (*interaktif model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles and Huberman (1984) dalam Miles et al., (2014) yang meliputi *data collection, data condensation, data display, conclusions, drawing and verifying*. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar kredibilitas yang meliputi triangulasi data dan peningkatan pengamatan, *transferability, dependability dan confirmability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Padat Karya dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya

1. Komunikasi

Komunikasi menurut Edward (1980) merupakan salah satu indikator yang berperan dalam menentukan tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik. Komunikasi yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dikerjakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait komunikasi, bahwa bidang Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Semampir memperoleh

informasi terkait pelaksanaan program padat karya dari Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan petunjuk teknis organisasi perangkat daerah yang ditunjuk sebagai pengampu Padat Karya. Kejelasan informasi dari Petunjuk teknis atau juknis peraturan tentang Program Padat Karya dalam Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 bertujuan untuk memudahkan pihak Kecamatan Semampir dalam menyelenggarakan padat karya kepada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Vera selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat bahwa:

Terkadang saya menemui data masyarakat yang tidak sesuai dengan realita, saya memberikan pengertian bahwa implementasi program padat karya hanya untuk masyarakat yang memiliki pendapatan dibawah Rp. 4.000.000 saja. Ada juga masyarakat yang sudah menjadi sasaran program tetapi menolak mbak, mereka punya pekerjaan lain, lebih memilih mengurus anak dan mengembangkan usaha sendiri.



Gambar 2. Program Padat Karya Pelatihan Mesin Jahit

Sumber: Kecamatan Semampir

Saat sosialisasi berlangsung terdapat kelompok masyarakat yang menolak Program Padat Karya karena lebih memilih untuk bekerja dengan pekerjaan lain. Sikap penerima program tersebut berbanding terbalik dengan antusiasme masyarakat yang setuju untuk terlibat program padat karya tersebut. Seperti, keterangan yang diberikan oleh Ibu Ratima selaku penerima bantuan modal usaha mesin jahit dari program Padat Karya bahwasannya:

Saya berterima kasih pada Pak Wali dan Pak Camat, sudah dikasih bantuan mesin jahit. Semoga program padat karya bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi saya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sekali lagi terima kasih atas bantuan mesin jahitnya.

Melalui hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program padat karya yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Surabaya menjadikan masyarakat yang membutuhkan telah terbantu berkat adanya pemberian modal dan pelatihan pekerjaan. Masyarakat dapat dengan mudah memilih minat pekerjaan yang akan dijalankan, dimana nantinya pemerintah akan memberikan penjelasan, pelatihan,

hingga evaluasi kepada masyarakat pelaksana program padat karya. *Ouput* yang dihasilkan dari adanya program ini, masyarakat yang awalnya memiliki penghasilan dibawah 4 juta akan bertambah sesuai dengan penghasilan rata-rata yang telah ditetapkan.

2. Sumber Daya

Edward (1980) menjelaskan bahwa sumber daya merupakan unsur penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan. Idealnya kondisi sumber daya manusia dapat dilihat dalam beberapa aspek, seperti sumber daya manusia, tersedianya anggaran, sarana dan prasarana yang memadai, dan sumber daya kewenangan. Adapun sumber daya manusia yang digunakan dalam pelaksanaan program padat karya di Kecamatan Semampir adalah 2 pegawai dari kecamatan semampir dan 1 pegawai dari masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Semampir dengan total keseluruhan 10 kelurahan yang dipilih melalui pemberian surat juknis dari walikota dan camat semampir. Sumber daya manusia dari sisi penerima manfaat program padat karya berasal dari kualifikasi yang telah ditentukan melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya yaitu: (1) termasuk dalam kategori masyarakat miskin, (2) KTP Surabaya, dan (3) penghasilan dibawah 4 juta rupiah.

Sumber daya yang kedua adalah anggaran, dimana dalam hal ini menggunakan dana APBD Kota Surabaya. Sumber daya yang ketiga yakni sarana prasana, yang dalam hal ini Kecamatan Semampir bersama dengan OPD se Pemerintah Kota Surabaya memberikan fasilitas pelatihan kepada masyarakat penerima program, seperti pelatihan menjahit, pembuatan paving, servis ac, dan laundry. Lalu, pihak kecamatan juga memberikan insentif berupa modal usaha kepada masyarakat yang ingin membuka usaha UMKM sendiri. Ibu Vera selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat memberikan jawaban terkait pelatihan yaitu:

Kami telah bekerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan untuk pelatihan menjahit, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pelatihan pembuatan paving, Badan Zakat Nasional untuk penyediaan modal usaha berupa gerobak, dan masih banyak lagi opd lain yang kami ajak untuk bekerja sama.

Sumber daya keempat adalah kewenangan, dalam hal ini Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat bersama dengan staf yang bertugas telah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mereka melakukan survei untuk memilah kelompok masyarakat yang berhak mengikuti program padat karya dan rutin melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya untuk meminimalisir apabila terjadi ketidaktepatan sasaran penerima program padat karya. Jika terdapat masyarakat yang menolak program padat karya, pelaksana kebijakan tidak dapat memaksakan kehendak masyarakat tersebut, tetapi pelaksana kebijakan akan memperbarui data tersebut dengan cara menghapus target sasaran program padat karya.

3. Disposisi

Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Semampir menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini disesuaikan dengan Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2023 tentang Padat Karya yang mengamanatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk menyukseskan Program Padat Karya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Ibu Vera selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, beliau menyampaikan bahwa:

Dalam program padat karya diampu oleh beberapa OPD. Jadi yang mengawal istilahnya untuk siapa penanggung jawabnya? nah itu OPD OPD terlibat di dalamnya. Jadi misalnya semacam Disnaker sebagai penanggung jawab padat karya khususnya padat karya pemberdayaan service AC. Jadi kemarin itu kita setiap bulan, mereka (Disnaker) melakukan fungsi monitoring dan evaluasi sudah sejauh mana program padat karya berjalan khususnya service AC di Kecamatan Semampir, dan OPD terkait lainnya.

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pegawai khusus yang diangkat hanya untuk menangani program padat karya melainkan hanya kolaborasi dan koordinasi antara Kantor Kecamatan Semampir dengan berbagai OPD lainnya yang bekerjasama.

Pada aspek insentif, pihak kantor kecamatan tidak memberikan insentif kepada sasaran program padat karya. Pihak kantor kecamatan dalam hal ini Kantor Kecamatan Semampir bekerjasama dengan OPD untuk memberikan fasilitas dan juga modal dalam program pemberdayaan pada padat karya. Beberapa contohnya seperti penyediaan alat usaha berupa alat mesin cuci, satu set peralatan barista cafe, dan lain lain.

Hal ini yang dikemukakan oleh Ibu Vera selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat yang mengemukakan bahwasannya:

Jadi perintahnya pak Wali jangan sampai warga kita yang miskin (baik ekstrim maupun non ekstrim) tidak kita lakukan intervensi. Intervensinya dalam bentuk apa? dalam bentuk padat karya tadi. Padat karya itu bisa kita titipkan di OPD terkait. Seperti di Dinas PUPR yang menyediakan RPK rumah paving. Jadi warga Kecamatan Semampir itu ada yang kuli batu. Dia itu memiliki kemampuan dalam membuat paving. Nah kita titipkan teman teman kuli batu ke Wonokusumo (lokasi rumah paving) yang telah disiapkan oleh OPD pengampu dalam hal ini Dinas PUPR.

4. Struktur Birokrasi

Edward (1980) menyampaikan bahwa efisiensi dan efektivitas birokrasi akan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Edward (1980) mengemukakan bahwa struktur birokrasi harus kuat yang ditopang melalui pelaksana kebijakan yang sudah

memahami alur kerja dan memiliki tujuan yang sama. Struktur birokrasi terdapat pembagian wewenang dan hubungan antar unit. Winarno dalam Mius et al., (2019) mengemukakan bahwa *Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi adalah dua komponen penting yang ada dalam struktur birokrasi. SOP adalah tuntutan alur pekerjaan yang mengharuskan terlibatnya sumber daya, waktu dan penyelesaian pekerjaan.

Hal ini yang dikemukakan oleh Ibu Vera selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat yang mengemukakan bahwasannya:

Kami sebagai pegawai sudah melakukan tugas sesuai dengan aturan yang ditujukan dengan pelaksanaan tagging di aplikasi <https://padatkarya.surabaya.go.id/login>. Adapun langkah- langkah dalam pelaksanaan tagging adalah outret ke rumah warga yang berkategori miskin, memberikan penawaran untuk mengikuti program padat karya, memberikan fasilitas berupa modal alat, dan pelatihan untuk pelaksanaan padat karya, dan terakhir kami selalu melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat apakah penerima program sudah melakukan kegiatan padat karya yang dipilih.

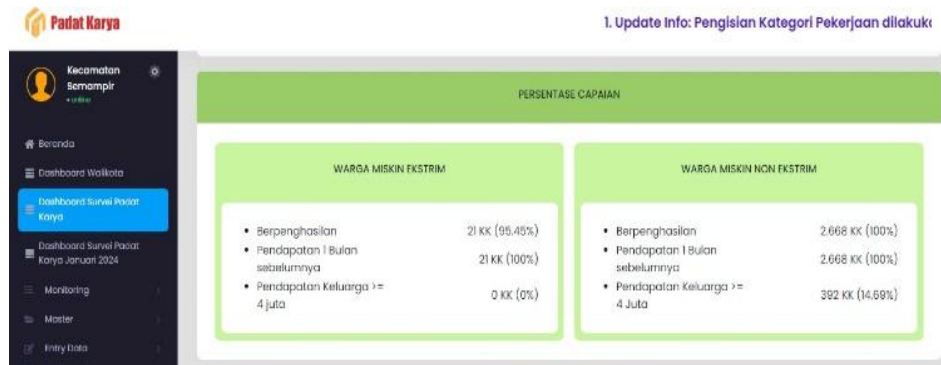
Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Semampir telah melaksanakan tugasnya dengan baik, akan tetapi belum ada SOP khusus untuk pengimplementasian program padat karya. SOP sendiri merupakan sebuah pedoman yang dapat digunakan organisasi untuk dapat mengimplementasikan sebuah program. Organisasi yang tidak memiliki SOP dapat mengakibatkan proses pengimplementasian program padat karya tidak berjalan efektif dan efisien.

Menurut Edward (1980) fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab yang dilakukan ke beberapa badan pemerintah sehingga memerlukan adanya koordinasi, namun koordinasi yang terlalu banyak menimbulkan kekurangan dalam mencapai keberhasilan program. Pengimplementasian Program Padat Karya di Kecamatan Semampir telah berhasil melakukan koordinasi hal ini dibuktikan dengan adanya mitra seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Baznas. Maka dapat disimpulkan bahwa fragmentasi yang dilakukan oleh Kecamatan Semampir dengan melibatkan beberapa organisasi pemerintah atau swasta berjalan baik sehingga Program Padat Karya berjalan efektif.

Dampak Program Padat Karya Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Berdasarkan data dari padat karya terdapat tiga kategori keluarga yang dijadikan sebagai kategori keluarga miskin untuk melaksanakan program padat karya yaitu: warga miskin, warga miskin ekstrim, dan warga miskin non ekstrim (Pemkot, 2021). Ketiga kategori diatas yang menjadi acuan Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan semampir untuk melakukan pengecekan dan penyaringan warga miskin di Kecamatan Semampir. Namun dalam realitanya, tidak

semua kriteria terpenuhi untuk melakukan program padat karya, seperti masyarakat yang menolak karena telah memiliki usaha tersendiri, lebih memilih untuk mengasuh



anak, dan masyarakat yang lanjut usia.

Gambar 3. Persentase Capaian Masyarakat Padat Karya Kecamatan Semampir Tahun 2024

Sumber: padatkarya.surabaya.go.id

Adapun dampak implementasi program padat karya dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Semampir yakni ditinjau dari sisi antusias bahwa masyarakat belum maksimal untuk mengikuti program padat karya karena terdapat beberapa masyarakat yang menolak untuk mengikuti program tersebut. Jika dilihat dari sisi pendapatan masih hanya terdapat 392 kk dari 2.668 kk yang memiliki penghasilan \geq 4 juta rupiah. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa program padat karya di Kecamatan Semampir belum berhasil menanggulangi kemiskinan karena presentase capaian masih 14,69% dari 100% dengan kondisi rasio ketergantungan sebesar 46,83 pada tahun 2023.

Akan tetapi, apabila dilihat dari sisi pemenuhan fasilitas, Kecamatan Semampir sudah sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan program padat karya. Hal ini dibuktikan adanya, 1) pelatihan kerja yang berkolaborasi dengan OPD lain, 2) pemberian modal uang, alat dan bahan, serta 3) monitoring dan evaluasi setiap bulannya. Setelah penulis menganalisa fakta di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rendahnya capaian program padat karya bukan merupakan dampak jangka panjang dari kegiatan Program Padat Karya, namun merupakan data masyarakat padat karya yang baru terupdate pada tahun 2024.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Program Padat Karya di Kecamatan Semampir tahun 2024 hasilnya belum sepenuhnya maksimal, hal ini dapat ditinjau dari empat aspek yang digagas oleh George Edward III yakni dari aspek komunikasi sudah baik karena pelaksana kebijakan sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang ingin mengikuti program padat karya. Penggunaan sumber daya sudah maksimal karena pegawai Kecamatan Semampir terutama di bidang kesejahteraan masyarakat sudah

memahami tugas dan kewenangan dalam menjalankan program padat karya, serta memberikan fasilitas berupa pelatihan dan modal untuk penerima manfaat program padat karya. Aspek disposisi sudah maksimal yang dapat dilihat dari adanya Peraturan Walikota No 8 Tahun 2021 yang menegaskan Dinas Tenaga Kerja mengintervensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjalankan program padat karya di Kota Surabaya. Namun masih terdapat kekurangan dalam aspek struktur birokrasi karena belum adanya SOP khusus yang mengatur pelaksanaan program padat karya di Kecamatan Semampir.

Adapun dampak dari adanya program padat karya di Kecamatan Semampir adalah program padat karya di Kecamatan Semampir belum berhasil menanggulangi kemiskinan karena presentase capaian masih 14,69% dari 100% dengan kondisi rasio ketergantungan sebesar 46,83 pada tahun 2023. Rendahnya capaian program padat karya bukan merupakan dampak jangka panjang dari kegiatan Program Padat Karya, namun merupakan data masyarakat padat karya yang baru terupdate pada tahun 2024. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan masukan bahwa program padat karya dapat terus dimaksimalkan setiap tahunnya untuk dapat menanggulangi kemiskinan sesuai dengan harapan Pemerintah Kota Surabaya, serta perlunya pembentukan SOP guna pelaksanaan program padat karya agar program lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, R. K., & Sidauruk, S. A. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 358. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i3.800>
- Disdukcapil. (2023). *Analisa Dampak Kependudukan Terhadap Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Tua*.
- Disdukcapil. (2024). *Kota Surabaya Dalam Angka Surabaya Municipality In Figures 2024*.
- Edward, G. C. (1980). *Implementing Public Policy Politics and public policy series*. Congressional Quarterly Press.
- Fatikhurizqi, A., & Kurniawan, B. D. (2022). Peran Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur Tahun 2020 (The Role of Social Assistance in Alleviating Extreme Poverty in East Java in 2020). *Seminar Nasional Official Statistics, 2020*, 1027–1036.
- Hartomo, & Aziz, A. (1997). *Ilmu Sosial Dasar*. Bumi Aksara.
- Jatim, BPS. (2023). *Profil Kemiskinan Di Jawa Timur Maret 2023*.
- Kemendagri. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan*.
- Lafina, A. R., Sholichah, N., Wardhono, H., & Widyawati. (2023). *Implementasi Program*

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 4 No 3 (2024) 1119 – 1130 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i3.2757

Padat Karya dalam Perspektif Collaborative Governance di Kelurahan Manyar Sabrangan Kota Surabaya. 7(2), 158–172.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analys*. Sage.
- Mius, A., Suradinata, E., Ilham, M., & Djaenuri, H. M. A. (2019). Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 49–73. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i1.917>
- Nabibah, E. T., & Hanifa, N. (2022). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. 2, 1–13.*
- Novanto, H. E., & Wibawani, S. (2023). Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 179. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8207>
- Pemkot. (2021). *Padat Karya*. www.padatkarya.surabaya.go.id
- Pemkot. (2024). *IPM Surabaya Terus Naik di Masa Kepemimpinan Walikota Eri, Tahun 2023 Capai 83,99*. <https://Www.Surabaya.Go.Id/>. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/78047/ipm-surabaya-terus-naik-di-masa-kepemimpinan-wali-kota-eri-tahun-2023-capai-8399>
- Ramdani, S., & Ratnawati, N. (2023). JOURNAL OF ECONOMIC WELL BEING (JOEW) Volume 1 Nomor 2 September 2022. *Jurnal of Economic Well Beng (JOEW)*, 1(September), 1–5.
- RPJMD. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. In *Pemerintah Kota Surabaya*. Bappedalitbang.
- Walikota. (2020). *Program Padat Karya di Kota Surabaya. 2017, 1–17*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/271974/perwali-kota-surabaya-no-83-tahun-2023>